



Mahein Nia Hanoin no. 1, 11 Maiu 2011.

Postur Pertahanan Indonesia di Wilayah Perbatasan Timor-Leste

I.	Pendahuluan	1
II.	Komando TNI di Timor Barat	1
	Kodim di Korem 161/Wira Sakti	2
	Korem dalam Kodam IX/Udayana	3
	Kekuatan Tempur Kodam IX/Udayana	3
	Personil Korem 161	4
	Pasukan Tempur TNI do Nusa Tenggara Timor	4
	Kekuatan Tempur Dalam Wilayah Korem 161 (Rencana)	6
III.	Penjagaan Perbatasan	7
	Peta Korem 161 Mengenai Penggelaran Pasukan SatGas Pamtas RI-RDTL	9
IV	Pengamanan Yang Berlebchan	11
V.	Masalah-Masalah di Perbatasan	15
	a. Garis Perbatasan Yang Belum Disepakati	15
	b. Pengelundupan	16
	c. Lintas Batas Ilegal	17
	d. Pengyitan Tidak Resumi	17
	e. Insiden Pelanggaran Perbatasan	18
	f. Kekerasan Terhadap Penduduk Sipil	
VI.	Penutup	20
	Bibliogari	21

I. Pendahuluan

Setelah Timor-Leste bebas dari pendudukan Indonesia pada tahun 1999, terjadi perubahan cukup besar militer Indonesia di Timor Barat, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Seluruh satuan militer Indonesia di Timor-Timur (sekarang Timor-Leste) ditarik ke Timor Barat. Satu dari batalyon Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpangkalan tetap di Provinsi Timor Timur, yaitu Batalyon Infanteri (Yonif) 745 dibubarkan dan satu lagi, Yonif 744, dipindahkan ke Timor Barat. Personil-personil satuan-satuan teritorial seperti Komando Rayon Militer (Koramil) dan Komando Distrik Militer (Kodim) diintegrasikan ke dalam komando-komando teritorial yang ada di Timor Barat. Di sepanjang perbatasan didirikan pos-pos tempat regu-regu pasukan tempur bertugas mengamankan wilayah Indonesia dari ancaman keamanan dari luar dan komando teritorial di tiga kabupaten mengadakan operasi pembinaan teritorial. Mahehin Nia Hanoin nomor: 1 ini akan membahas peningkatan kekuatan militer Indonesia di Timor Barat dan penjagaan yang dilakukan TNI di sepanjang perbatasan Indonesia dengan negara berdaulat Republik Demokratik Timor-Leste yang baru merdeka.

II. Komando TNI di Timor Barat

TNI membagi seluruh wilayah Indonesia ke dalam wilayah-wilayah pertahanan yang disebut komando teritorial atau komando kewilayahan, dari mulai Komando Daerah Militer (Kodam) yang wilayahnya meliputi satu hingga tiga provinsi, Komando Resort Militer (Korem), wilayahnya meliputi beberapa kabupaten hingga satu provinsi, Komando Distrik Militer (Kodim) yang wilayahnya mencakup satu sampai dua kabupaten, dan Komando Rayon Militer (Koramil) yang wilayahnya meliputi satu kecamatan. Fungsi komando teritorial adalah melakukan pembinaan pasukan (pelatihan dan pemeliharaan), operasi militer (yang dibagi menjadi 'operasi militer perang' dan operasi militer selain perang¹), dan pembinaan teritorial (mengumpulkan informasi, melatih dan mengorganisir penduduk sipil untuk membantu operasi TNI, mempersiapkan logistik, dan mempersiapkan wilayah untuk pertahanan).²

Dalam susunan komando teritorial TNI, Timor Barat adalah bagian dari Korem 161/Wira Sakti yang bermarkas di Kupang. Wilayah Korem 161 mencakup seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terbagi ke dalam 12 Kodim. Timor Barat terbagi ke dalam empat Komando Distrik Militer (Kodim), yaitu Kodim 1604 yang bermarkas di Kupang dengan wilayah mencakup Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, Kodim 1605 dengan markas di Atambua yang wilayahnya meliputi seluruh Kabupaten Belu, Kodim 1618 bermarkas di Kefamenanu yang wilayahnya meliputi seluruh Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kodim 1621 bermarkas di So'e yang wilayahnya meliputi seluruh Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kodim di Korem 161/Wira Sakti

Kodim	Wilayah	Markas
Kodim 1601	Kabupaten Sumba Timur	Waingapu

¹ Operasi militer selain perang mencakup antara lain operasi bantuan ketika terjadi bencana alam, bantuan kepada kepolisian, dan penjagaan perbatasan. (Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad ke-21 – Buku Putih Pertahanan 2003*, hal. 10-11).

² H.D. Wahana (Perwira Dinas Penerangan Kodam IV/Diponegoro), "Pembinaan Teritorial dalam UU TNI," *Suara Merdeka*, 19 Agustus 2009; Letnan Kolonel Judi Paragina, "Re-Vitalisasi Dan Re-Aktualisasi Pembinaan Teritorial Komando Kewilayahan TNI AA Guna Mendukung Kepentingan Pertahanan Matra Darat Pada Masa Mendatang," situs jaringan Kodam Jayakarta, <http://www.kodam-jaya.mil.id/arsip-artikel-kontribusi/960-re-vitalisasi-dan-re-aktualisasi-pembinaan-teritorial-komando-kewilayahan-tni-aa-guna-mendukung-kepentingan-pertahanan-matra-darat-pada-masa-mendatang?start=1>

Kodim 1602	Kabupaten Ende	Ende
Kodim 1603	Kabupaten Sikka	Sikka
Kodim 1604	Kabupaten Kupang dan Kota Kupang	Kupang
Kodim 1605	Kabupaten Belu	Atambua
Kodim 1612	Kabupaten Manggarai	Manggarai
Kodim 1613	Kabupaten Sumba Barat	Waikabubak
Kodim 1618	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kefamenanu
Kodim 1621	Kabupaten Timor Tengah Selatan	So'e
Kodim 1622	Alor	Kalabahi
Kodim 1624	Kabupaten Flores Timur	Larantuka
Kodim 1625	Kabupaten Ngada	Ngada

Korem 161/WS adalah bagian dari Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana yang bermarkas di Denpasar, Bali. Kodam IX wilayahnya mencakup tiga provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Komando teritorial militer untuk masing-masing provinsi ini adalah Korem 161 untuk Provinsi NTT, Korem 162/Wira Bhakti untuk Provinsi NTB bermarkas di kota Mataram, Lombok, dan Korem 163/Wira Satya untuk Provinsi Bali bermarkas di Denpasar.

Korem dalam Kodam IX/Udayana

Korem	Wilayah	Markas
Korem 161	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang
Korem 162	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram
Korem 163	Provinsi Bali	Denpasar

Selain membawahi komando teritorial, Kodam IX juga membawahi pasukan tempur, yang terdiri dari infanteri, kavaleri, dan zeni (*engineer*). Pasukan infanteri seluruhnya berjumlah empat batalyon, yaitu Yonif 742/Satya Wira Yudha (bermarkas di Gebang, Mataram, Nusa Tenggara Barat), Yonif 743/Pradnya Samapta Bhakti (bermarkas di Naibonat, Kabupaten Kupang), Yonif 744/Satya Yudha Bhakti (bermarkas di Tobir, Kabupaten Belu), dan Yonif 900/Raider (bermarkas di kota Singaraja, Bali).³ Batalyon infanteri Indonesia berkekuatan 600-1000 personil. Kebanyakan batalyon berkekuatan 800 personil, yang terbagi ke dalam empat kompi, yaitu satu kompi markas, dua kompi pengempur, dan satu kompi bantuan.

Pasukan kavaleri Kodam IX/Udayana berkekuatan satu kompi, yaitu Kompi Kavaleri Serbu (Kikavser) bermarkas di Denpasar. Sedang pasukan zeni berkekuatan satu detasemen, yaitu Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 9 bermarkas di Gianyar, Bali.

Kekuatan Tempur Kodam IX/Udayana

Satuan	Markas	Keterangan
Yonif 742	Mataram (Lombok)	
Yonif 743	Naibonat (Kabupaten Kupang)	Dua kompi berada di luar pulau Timor, yaitu di Waingapu (Sumba), dan Ende (Flores)

³ Sebelum Referendum 1999, pasukan infanteri Kodam IX berkekuatan lima batalyon, batalyon kelima adalah Yonif 745 yang dibubarkan pada 21 September 1999 setelah ditarik ke Timor Barat. Sebelumnya batalyon ini berpangkalan di Provinsi Timor Timur (bersama dengan Yonif 744).

Yonif 744	Tobir (Kabupaten Belu)	Sebelumnya bermarkas di Timor Timur
Yonif 900/Raider	Singaraja (Bali)	Sebelumnya bernama Yonif 741/Satya Bhakti Wirottama, perubahan namanya terjadi setelah ditingkatkan kemampuannya untuk perang khusus, anti-gerilya (<i>counter insurgency</i>) dan anti-terorist pada tahun 2003.
Detasemen Zeni Tempur 9	Gianyar (Bali)	
Kikavser Kodam IX	Denpasar (Bali)	

Jika kita perhatikan penempatan pangkalan pasukan tempur, terlihat bahwa pasukan tempur Kodam IX terkonsentrasi di Korem 161. Dua dari empat batalyon infanteri Kodam IX berpangkalan di dalam wilayah Korem 161, yaitu Yonif 743 dan Yonif 744. Setengah dari kekuatan Yonif 743 berada di Timor Barat, yaitu Kompi A dan Kompi B, sedangkan Kompi C ditempatkan di Ende (Flores) dan Kompi D di Waingapu (Sumba). Semua kompi Yonif 744 berada di Timor Barat. Penempatan ini menunjukkan pentingnya Nusa Tenggara Timur, dan Timor Barat khususnya, bagi Kodam IX. Di masa lalu, ketika Timor-Leste masih menjadi provinsi *de facto* Indonesia, di wilayah ini kekuatan tempur TNI banyak dikerahkan di provinsi Timor Timur karena pada waktu itu TNI berada dalam keadaan konflik bersenjata dengan Forças Armadas da Libertação de Timor-Leste (FALINTIL) yang sedang berperang gerilya untuk kemerdekaan Timor-Leste. Dua batalyon infanteri (Yonif 744 dan Yonif 745) khusus dibentuk dan ditempatkan di provinsi ini dan selain itu ada sejumlah batalyon yang ditugaskan di provinsi ini dari luar wilayah Kodam IX yang jumlahnya berbeda-beda tergantung pada operasi militer yang sedang dilakukan. Setelah Timor-Leste merdeka, wilayah Korem 161 dan khususnya daratan Timor Barat dianggap penting karena berbatasan dengan negara lain, yaitu Timor-Leste (berbatasan darat dan laut) dan Australia (berbatasan laut).

Bersama dengan satuan-satuan teritorial, kekuatan total Korem 161 adalah 5.337 orang dengan rincian sebagai berikut:⁴

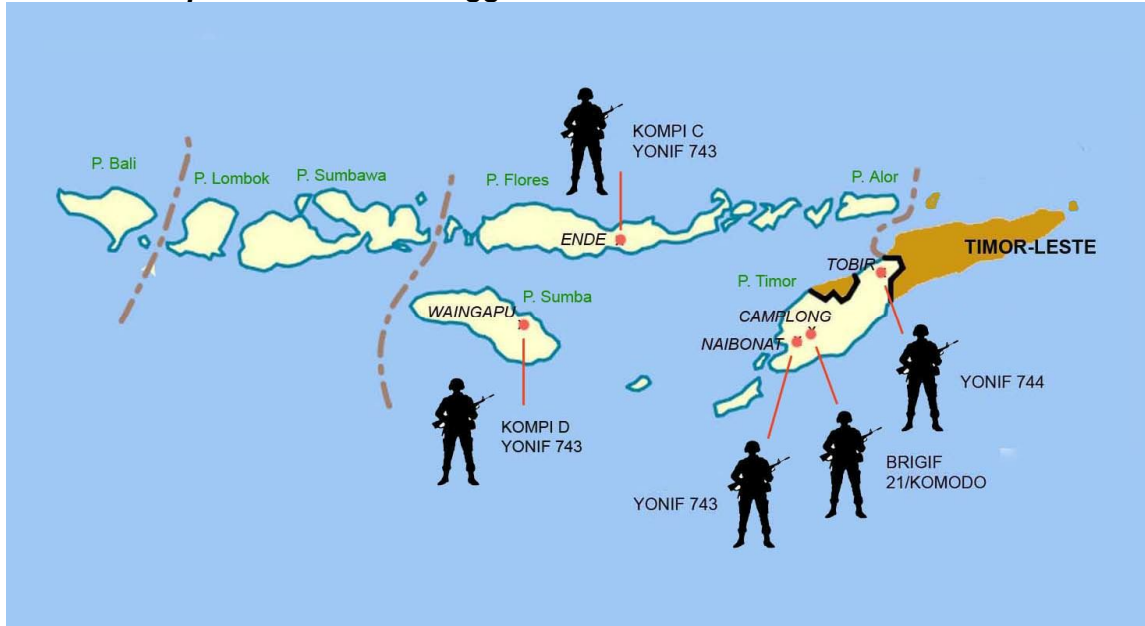
Personil Korem 161

Satuan	Kekuatan
Markas Korem 161	358 orang
BALAKREM (Badan Pelaksana Korem) 161	402 orang
12 Kodim	2.938 orang
Yonif 743 & Yonif 744	1.639 orang
Jumlah	5.337 orang

⁴ Berdasar keterangan Komandan Korem 161/WS, yang dikutip oleh Ganewati Wuryandari (penyunting), *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor-Leste*, hal. 168. 2010

Kekuatan Korem 161 bisa lebih besar dari angka tersebut, yaitu ketika batalyon dari luar ditugaskan di wilayahnya. Ini karena Korem 161 juga membawahi satuan penjaga perbatasan berkekuatan satu batalyon yang pasukannya secara berkala didatangkan dari luar (diuraikan di bawah).

Pasukan tempur TNI di Nusa Tenggara Timur



Meskipun kekuatan militernya cukup besar, pimpinan TNI menganggap masih perlu untuk meningkatkannya. Pada bulan Desember 2009 Panglima TNI meresmikan pembentukan Brigade Infanteri (Brigif) 21 Komodo dengan markas di Camplong (Kabupaten Kupang). Meskipun dengan pembentukan Brigif 21 tidak terjadi penambahan personel yang berarti, karena batalyon-batalyon pembentuknya adalah batalyon yang sudah ada, yaitu Yonif 743 dan Yonif 744, hal ini meningkatkan kemampuan operasional TNI di Timor Barat. Dalam pelantikan komandan pertama brigade ini, Panglima Kodam IX mengatakan bahwa pembentukan ini adalah untuk “mengefektifkan komando dan pengendalian satuan”. Menurutnya, dengan pembentukan Brigif 21, pelaksanaan penugasan Yonif 743 dan Yonif 744 akan lebih lancar dan pembinaan pasukan menjadi “lebih terprogram dan terpusat.”⁵ Selain pembentukan Brigif, Markas Besar TNI berencana meningkatkan kekuatan Yonif 744, yaitu dari empat kompi berkekuatan sekitar 800 personel menjadi lima kompi berkekuatan 1.039 personel.⁶

Rencana lain yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah pembentukan Korem di Flores dan pembentukan beberapa batalyon di Flores dan Timor Barat. Pembentukan Korem di Flores telah direncanakan pada 2000, yaitu sebagai pemindahan dari Korem 164/Wira Dharma dari Timor Timur. Tetapi rencana ini belum terealisasi karena ditentang oleh berbagai kalangan di sana.⁷ Organisasi-organisasi non-pemerintah

⁵ “Putra NTT Pimpin Brigif 21 Komodo,” *Pos Kupang*, 20 Februari 2010.

⁶ Keterangan Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal Herry Tjahjana, dikutip *Antara*, 9 Mei 2005 (versi bahasa Inggris dimuat dalam website ETAN, <http://www.etan.org/et2005/may/15/10tni.htm>)

⁷ “TNI Sudah Programkan Pembentukan Korem di Flores,” *Antara*, <http://alutsista.blogspot.com/2007/08/rusia-pertimbangkan-bangun-pangkalan.html> - links

(NGO) dan kalangan Gereja Katolik khawatir bahwa pembentukan Korem justru akan menimbulkan ekses berupa kekerasan oleh anggota militer terhadap penduduk sipil.⁸ Batalyon-batalyon yang akan dibangun adalah satu batalyon infanteri di Flores (bermarkas di Ende, yang kompi-kompinya akan disebar di Flores bagian timur, tengah, dan barat) , satu batalyon artileri medan di Timor Tengah Utara, satu batalyon kavaleri di Belu, dan satu batalyon artileri pertahanan udara di Timor Tengah Selatan. Juga akan didirikan satu detasemen zeni tempur (*combat engineer*) di Timor Tengah Selatan.⁹

Pasukan-pasukan yang akan dibentuk tersebut terkonsentrasi di Timor Barat. Ini berkaitan dengan alasan penambahan kekuatan militer di kawasan ini, yaitu seperti yang dikatakan oleh Kol. Arief Rachman, Komandan Korem 161 pada 2007, “guna mengoptimalkan pengamanan kedaulatan negara”.¹⁰ Dengan kata lain, penambahan kekuatan dilakukan untuk mengamankan wilayah Indonesia dari ancaman eksternal. Agaknya terkait dengan rencana ini dalam waktu dekat status Korem 161 juga akan ditingkatkan. Korem ini akan dipimpin seorang komandan berpangkat brigadir jenderal, satu tingkat di atas pangkat komandan sekarang (kolonel). Menurut Komandan Korem 161 sekarang, Kolonel Ketut Siangan, sebab peningkatan ini adalah karena wilayahnya berbatasan langsung dengan dua negara, yakni Australia dan Timor-Leste.¹¹

Kekuatan tempur dalam wilayah Korem 161 (rencana)

Kesatuan	Kekuatan	Pangkalan
Infanteri	3 batalyon	Flores (1), Timor Barat (2)
Kavaleri	1 batalyon	Timor Barat (Kabupaten Belu)
Artileri Medan	1 batalyon	Timor Barat (Kabupaten Timor Tengah Utara)
Artileri Pertahanan Udara	1 batalyon	Timor Barat (Timor Tengah Selatan)
Zeni Tempur	1 detasemen	Timor Barat (Timor Tengah Selatan)

Penambahan kekuatan TNI di NTT dengan alasan tersebut juga akan dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Sejak 2005 TNI AL berencana akan membantun pangkalan di Pulau Wetar yang terletak di sebelah utara Timor-Leste dan dalam waktu tidak lama lagi akan mendapat kapal perang baru. Pangkalan ini bagian dari Lantamal VIII Maluku. Menurut penjelasan Komandan Lantamal VIII waktu itu, ini adalah bagian dari program untuk pulau terluar dan Wetar dianggap sebagai pulau yang

⁸ Wawancara dengan KM (aktivis NGO), Desember 2010 dan BH (sumber dalam Gereja Katolik), Kupang, Desember 2010.

⁹ Rencana ini dikemukakan dalam penjelasan Komandan Korem 161/WS Kolonel (Infanteri) Arief Rachman kepada sidang komisi gabungan DPRD NTT, Kupang, Agustus 2007, dikutip dalam “NTT Butuh Lima Batalyon TNI AD”, *Antara*, dipasang pada situs jaringan Departemen Pertahanan RI, http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&new_topic=1. Dalam rencana ini, Kompi C Yonif 742 yang sekarang berada di Ende akan dipindahkan ke Kalabahi (Pulau Alor) yang berbatasan dengan Timor-Leste dan markas Kompi C akan dijadikan markas batalyon infanteri yang akan dibentuk.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ “Korem Wirasakti Naik Status,” *Pos Kupang*, 7 Januari 2011. Berita ini juga menyebutkan bahwa Korem 161 dinaikkan statusnya bersama 12 Korem yang lain, yaitu: Korem 032/WRB Padang, Korem 033/WP Tanjung Pinang, Korem 031/WB Pekanbaru, Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 081/DJ Madiun, Korem 083/BJ Malang, Korem 121/ABW Sintang, Korem 091/ASN Samarinda, Korem 131/STG Manado, Korem 152/BDL Ternate, Korem 173/PVB Biak, dan Korem 174/ATW Merauke. Sebagian besar Korem tersebut berbatasan dengan negara lain.

rentan karena berbatasan dengan Timor-Leste.¹² Sebagai bagian dari penguatan pertahanan, TNI AL pada 2002 juga telah membangun satu mercu suar di Loronwisi, Tanjung Oirata, Pulau Kisar¹³ (berseberangan dengan Lospalos). Meskipun tidak banyak, TNI AU juga meningkatkan kemampuannya di kawasan ini karena alasan yang sama, yakni meningkatkan pengamanan kawasan perbatasan. Setelah kemerdekaan Timor-Leste menempatkan empat pesawat supersonik F-5E di Pangkalan TNI AU El Tari, Kupang dan mendirikan radar di desa Buraen (Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang), Saumlaki (Maluku Utara), Merauke, Timika dan Biak (Papua). TNI AU juga masih berencana menambah radar di kawasan timur Indonesia, termasuk di Pulau Sumba. Penambahan di wilayah NTT ini menurut Kepala Staf AU Marsekal Imam Sufaat, karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Timor-Leste dan Australia “sehingga perlu mendapatkan pengamanan maksimal.”¹⁴

III. Penjagaan Perbatasan

Sebagai komando teritorial yang wilayahnya berbatasan dengan negara lain, Korem 161 diberi tugas oleh Markas Besar TNI untuk melakukan operasi pengamanan perbatasan. Sesuai dengan Undang-Undang TNI pasal 7 ayat 2, penjagaan perbatasan Indonesia dilaksanakan oleh pasukan TNI. Operasi pengamanan perbatasan Indonesia dengan Timor-Leste dikendalikan oleh Korem 161, yang dalam hal ini bertindak sebagai Komando Pelaksana Operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL (Kolakops Pamtas RI-RDTL),¹⁵ dan komandan Korem 161/WS menjadi Komandan Kolakops Pamtas RI-RDTL. Pasukan yang melaksanakan operasi ini diberi nama Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor-Leste (Satgas Pamtas RI-RDTL) dengan kekuatan sebesar satu batalyon.

Pada awalnya, pasukan untuk Satgas Pamtas RI-RDTL diambilkan dari batalyon-batalyon di luar Kodam IX yang berasal dari pasukan elit Kostrad (Komando Cadangan dan Strategis TNI Angkatan Darat), seperti Yonif 514/Raider dari Brigade Infanteri 9 Kostrad yang berpangkalan di Situbondo, Jawa Timur dan Batalyon Infanteri Lintas Udara 432 yang bermarkas di Maros, Sulawesi Selatan (bertugas sebagai Pamtas pada Oktober 1999-Juni 2000) atau batalyon infanteri Kodam seperti Yonif 621/Manuntung¹⁶ yang merupakan batalyon Kodam VI/Mulawarman yang bermarkas di Kandangan, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (bertugas pada tahun 2002). Setelah 2005 penugasan untuk Satgas Pamtas RI-RDTL digilir dari tiga batalyon infanteri Kodam IX yang bermarkas di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yaitu Yonif 742 (yang bermarkas di Mataram, Lombok), Yonif 743 (bermarkas di Naibonat, Kabupaten Kupang), dan Yonif 744 (bermarkas di Tobir, Kabupaten Belu, dekat dengan perbatasan). Satgas Pamtas dipimpin oleh seorang komandan berpangkat letnan

¹² “Indonesia to establish new naval base near East Timor,” *Antara*, 11 Mei 2005, dimuat dalam situs jaringan ETAN, <http://www.etan.org/et2005/may/15/12titiest.htm>

¹³ “RI Navy continues to safeguard Kisar, Wetar Islands,” *Antara*, 10 Mei 2005, dimuat dalam situs jaringan ETAN, <http://www.etan.org>.

¹⁴ “TNI AU Tambah Satu Radar di Sumba,” *Antara*, 6 Juli 2010, <http://www.antaranews.com/berita/1278389612/tni-au-tambah-satu-radar-di-sumba>

¹⁵ Kolonel (Arh) I Dewa Ketut Siangan (Komandan Korem 161/WS), “Peran TNI dalam Menciptakan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) yang Damai,” makalah untuk lokakarya Security Sector Reform, diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), di Atambua, 20 Agustus 2010. Lihat pula “Satgas Pamtas Dialihkan ke Yonif 743/PSY,” *Kursor*, 5 Januari 2011.

¹⁶ “Banyak Warga Timtim Menyusup ke NTT Lewat Pasar Perbatasan,” situs jaringan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, www.dephan.go.id/modules.php?name=News&new_topic=1, diakses pada 3 Januari 2011.

kolonel. Saat ini batalyon yang bertugas sebagai Satgas Pamtas adalah Yonif 743,¹⁷ yang menggantikan Yonif 742 sejak Januari 2011.¹⁸ Setiap batalyon bertugas secara bergiliran selama satu tahun dalam Satgas Pamtas RI-RDTL.

Menarik diperhatikan bahwa batalyon-batalyon yang bertugas sebagai Satgas Pamtas bukanlah batalyon-batalyon yang pernah bertugas di Provinsi Timor-Timur untuk memberantas perlawanan bersenjata FALINTIL. Hal ini agaknya dilakukan oleh Markas Besar TNI untuk memastikan bahwa personil-personil TNI yang bertugas itu tidak memiliki hubungan dengan mantan anggota kelompok-kelompok milisi yang di masa lalu membantu TNI dalam memberantas perlawanan Timor-Leste (yang oleh TNI disebut sebagai “Gerombolan Pengacau Keamanan” yang disingkat “GPK”). Karena adanya hubungan ini bisa membuat anggota-anggota TNI tidak melakukan tindakan terhadap mantan anggota-anggota milisi yang melakukan gangguan keamanan di Timor Barat dan mengganggu hubungan baik Indonesia dengan Timor-Leste.¹⁹

Perbatasan darat antara Timor-Leste dan Indonesia panjangnya 228 kilometer yang terbagi ke dalam dua bagian²⁰. Bagian timur panjangnya yang dimana Distrik Bobonaro dan Distrik Covalima berbatasan dengan Kabupaten Belu (yang ibukotanya Atambua). Perbatasan bagian barat panjangnya yang dimana Distrik Oecusse (Timor-Leste) berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara (ibukota: Kefamenanu) dan Kabupaten Kupang (ibukota: Kupang). Untuk menjaga keamanan, Pasukan Satgas Pamtas ditempatkan di sepanjang perbatasan tersebut. Pada perbatasan timur, pasukan ditempatkan di pos-pos perbatasan yang jumlahnya 25 pos, yaitu: (1) Motaain 1, (2) Motaain, (3) Silawan, (4) Haliwen, (5) Salore, (6) Mahen, (7) Asumanu, (8) Maubusa, (9) Nunura, (10) Turiscain, (11) Dilomil, (12) Kewar, (13), Lakmars, (14) Fohuk, (15) Foholulik, (16) Fatubesi Atas, (17) Dafala, (18) Lookeu, (19) Laktutus, (20) Nanano, (21) Ailala, (22) Fatuha, (23) Auren, (24) Haslot, dan (25) Motamasin. Sementara di perbatasan timur pasukan ditempatkan di 13 pos, yaitu 10 pos termasuk dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (pos Olbinose, Manusasi, Ninulat, Haumeniana, Baen, Inbate, Nino, Napan Bawah, Wini, dan Kefa) dan tiga pos dalam wilayah Kabupaten Kupang (Opoli Pantai, Oepoli, dan Oepoli Sungai).²¹

Jika dibandingkan dengan penjagaan perbatasan Indonesia dengan Malaysia, penjagaan perbatasan dengan Timor-Leste jauh lebih ketat. Perbatasan antara Kalimantan Timur dengan Sabah, Malaysia yang panjangnya 1782 kilometer dijaga oleh

¹⁷ “Batalyon Penjaga Perbatasan Indonesia-Timor Leste Dirotasi,” *Antara*, 6 Januari 2011 (<http://www.antaraneews.com/berita/1294289370/batalyon-penjaga-perbatasan-indonesia-timor-leste-diroisasi>).

¹⁸ “Batalyon Infanteri 742/SWY Agar Tidak Sakiti Rakyat,” *NTT Online*, 14 Januari 2010. “Perbatasan dengan Timor Leste Harus Dijaga Ketat,” *Metronews.com*, 9 April 2010.

¹⁹ Salah satu kejadian yang menunjukkan bahwa TNI tidak lagi mentolerir kegiatan mantan milisi yang mengganggu keamanan adalah tindakan keras terhadap beberapa orang mantan anggota milisi yang hendak melakukan protes terhadap penangkapan sejumlah mantan milisi yang melakukan infiltrasi ke Timor-Leste pada tahun 2004. Mereka ditangkap oleh petugas Satgas Pamtas ketika mendekati perbatasan di Mota Ain. (Wawancara dengan LR, seorang pekerja kemanusiaan di Timor Barat, Atambua, Januari 2011).

²⁰ *Managing Tensions on the Timor-Leste/Indonesia Border Crisis Group Asia Briefing N°50*, 4 May 2006, p.7.

²¹ Kolonel (Arh) I Dewa Ketut Siangan, *ibid.*, hal. 10. Selain itu, Korem 161/WS juga menempatkan pasukan di pos yang terletak di “pulau terluar/terdepan”, yaitu Pulau Batek (yang oleh Timor-Leste disebut Fatuk Sinai), Pulau Dana. Penggelaran pasukan ini tidak dilakukan oleh Satgas Pamtas RI-RDTL tetapi dilakukan oleh Satuan Tugas Pulau Terluar/Terdepan.

satu batalyon²² yang ditempatkan di 27 pos.²³ Sementara perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak, Malaysia yang panjangnya 966 kilometer juga dijaga oleh satu batalyon berkekuatan 615 personel yang ditempatkan di 32 pos.²⁴

Peta yang dibuat Korem 161 mengenai penggelaran pasukan di perbatasan pada 2010 menunjukkan bahwa pasukan Satgas Pamtas RDTL-RI terdiri dari lima “Kompi Tempur” (disingkat Kipur). Kipur 1 bermarkas di Motamasin, Kipur 2 bermarkas di Kewar, Kipur 3 di Mota Ain, yang semuanya berada di perbatasan timur, sedang Kipur 4 bermarkas di Napan Bawah dan Kipur 5 di Oepoli yang berada di perbatasan bagian barat. Kompi-kompi tempur tersebut dibagi ke dalam regu-regu [bahasa Portugis: *secções*] pasukan, yang setiap satu regu ditugaskan menjaga satu pos perbatasan.

Dari peta yang dibuat oleh Korem 161, maka tampak jelas bahwa TNI menjaga rapat perbatasan darat antara Indonesia dan Timor-Leste (lihat peta berikut), seolah-olah Indonesia sedang menghadapi ancaman yang sangat serius dari seberang perbatasannya. Pembagian pasukan-pasukan Satgas Pamtas RI-RDTL ke dalam “kompi-kompi tempur” di sepanjang perbatasan memperkuat kesan bahwa TNI sedang bersiap-siap untuk bertempur melawan musuh yang akan merusak keutuhan wilayah Indonesia.

Peta Korem 161 mengenai Penggelaran Pasukan Satgas Pamtas RI-RDTL

²² “Panglima TNI Tinjau Perbatasan Indonesia-Malaysia,” *Antara*, 26 Februari 2011,

²³ “Insentif TNI Perbatasan 75 Persen dari Gaji,” *Antara*, dimuat pada situs jaringan Kementerian Pertahanan RI, <http://www.kemhan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=9364>

²⁴ “TNI Evaluasi Pos Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia,” *Antara*, 27 Februari 2011, <http://www.antarane.ws.com/berita/247736/panglima-tni-tinjau-perbatasan-indonesia-malaysia> dimuat pada <http://id.news.yahoo.com/antr/20110226/tpl-tni-evaluasi-pos-pengamanan-perbatas-cc08abe.html>



Sumber: Komandan Korem 161 Kolonel (Artileri) I Dewa Ktut Siangan, "Paparasi Danrem 161/Wirasakti pada Diskusi Publik tentang Peran TNI di Perbatasan," Presentasi PowerPoint pada Diskusi publik mengenai Security Sector Reform, diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Cabang Kupang, di Atambua, 20 Agustus 2010. Peta ada pada halaman 25.

Penjagaan oleh TNI ini masih diperkuat lagi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Di Kabupaten Belu saja, POLRI mendirikan dan mengoperasikan enam pos penjagaan. Menurut Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, petugas polisi yang mengamankan perbatasan seluruhnya berkekuatan satu kompi yang berasal dari satuan paramiliter POLRI yang bernama Brimob (Brigade Mobil). Tugas utama pasukan ini adalah membantu pengamanan perbatasan oleh TNI (Satgas Pamtas RDTL-RI).²⁵

Dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan, selain menggelar pasukannya di pos-pos penjagaan, TNI juga melakukan berbagai kegiatan "pembinaan teritorial". Tujuan pembinaan teritorial adalah untuk mempersiapkan wilayah dan kekuatan pendukungnya untuk mempertahankan negara terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri yang membahayakan keutuhan negara dan keamanan nasional. Yang termasuk sebagai kekuatan pendukungnya adalah apa yang oleh TNI disebut sebagai "Rakyat Terlatih" (Ratih) yang terdiri dari Hansip (Pertahanan Sipil) dan Wanra (Perlawanan Rakyat) yaitu penduduk sipil yang dilatih dan diorganisir untuk membantu tugas-tugas

²⁵ "Fuel smuggling along East Timor border again rampant" by Indonesian Detikcom web site, 22 May 2005 (Asia Intelligence Wire, 23 May 2005, dipasang pada situs jaringan East Timor Action Network (ETAN), www.etan.org).

penegakan keamanan internal dan pertahanan eksternal.²⁶ Sasaran “pembinaan teritorial” adalah untuk menciptakan “ruang juang yang tangguh” yaitu wilayah pertahanan yang siap sebagai medan perang atau medan operasi, “alat juang yang tangguh” yaitu komponen cadangan dan pendukung TNI yang siap digunakan untuk memenangkan pertempuran, “kondisi juang yang tangguh” yaitu masyarakat yang bertanggungjawab dan rela berkorban, dan “kemanunggalan TNI-rakyat” yaitu ikatan yang kokoh dan kuat serta persatuan TNI dengan rakyat.²⁷

“Pembinaan teritorial” adalah tugas rutin setiap komando teritorial dari Kodam hingga Koramil di mana saja di Indonesia. Tetapi, untuk wilayah perbatasan Timor-Leste dengan Indonesia, rupanya Korem 161 memberikan perhatian khusus. Hal ini terlihat dari penggelaran “Satuan Tugas Teritorial”, yang dilaksanakan oleh Kodim 1604/Kupang, Kodim 1605/Belu, dan Kodim 1608/Timor Tengah Utara di wilayah kerja masing-masing yang berbatasan dengan Timor-Leste.²⁸

Menurut Komandan Korem 161 Kolonel I Dewa Ketut Siangan, upaya nyata yang dilakukan antara lain adalah: melaksanakan pembinaan terhadap tokoh-tokoh agama, adat dan pemuda dan pengungsi; penghijauan; kursus Pramuka untuk Babinsa (Bintara Pembina Desa, yaitu petugas TNI berpangkat sersan yang bertugas melakukan “pembinaan teritorial” di tingkat desa) yang menjadi pembina Pramuka di wilayah masing-masing, revitalisasi KB (Keluarga Berencana) dan bakti sosial, dan pemberantasan buta huruf.²⁹ Dari keterangan ini, tampak bahwa “pembinaan teritorial” oleh Korem 161 lebih banyak berupa kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan seperti ini agaknya dilakukan untuk meningkatkan nama baik atau citra TNI di mata penduduk sipil, yang sangat diperlukan untuk menunjukkan “kemanunggalan TNI-Rakyat”. Ini penting bagi TNI pada masa pasca-Orde Baru (1966-98), mengingat di masa Orde Baru citra TNI sangat merosot di mata rakyat karena komando teritorial TNI lebih banyak melakukan operasi untuk tujuan politik mempertahankan kekuasaan pemerintah Orde Baru di bawah Presiden H.M. Soeharto.

Bahwa kegiatan teritorial di wilayah perbatasan dengan Timor-Leste lebih diutamakan pada pembinaan tokoh agama, adat dan pengungsi serta kesejahteraan masyarakat, kemungkinan berhubungan dengan kenyataan bahwa di wilayah ini beberapa kali muncul keberatan dan protes mengenai kehadiran TNI yang kerap menimbulkan ekses berupa kekerasan terhadap penduduk sipil dan juga mengenai penambahan kekuatan TNI seperti pembangunan Brigif di Timor Barat dan rencana pembangunan Korem di Flores.³⁰ Kegiatan kesejahteraan rakyat agaknya diperlukan untuk menaikkan citra ABRI sehingga masyarakat menerima kehadiran TNI (khususnya TNI AD) yang meningkat di wilayah ini.

²⁶ Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat, “Pembinaan Teritorial Menurut Perspektif TNI dan Perspektif Komponen Bangsa Lainnya,” makalah, situs jaringan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, <http://www.tniad.mil.id/1artikel.php?pil=1&dn=20080812125129>).

²⁷ Pusat Teritorial TNI AD, *loc. cit.*

²⁸ Kolonel I Dewa Ketut Siangan, hal 10.

²⁹ *Ibid.*, hal. 13.

³⁰ “Pastor di Kupang Dipukuli Anggota Pamtas Yonif 742,” *Tempo Interaktif*, 24 September 2010; “Rencana pembangunan Markas Brigif Mendapat Tantangan,” situs jaringan NTT Online, http://www.nttonlinenews.com/ntt/index.php?option=com_content&view=article&id=3662:rencana-pembangunan-markas-brigif-mendapat-tantangan&catid=52:lain-lain&Itemid=70

IV. Pengamanan Yang Berlebihan?

Dalam kepustakaan mengenai keamanan, pengamanan perbatasan oleh Indonesia tergolong apa yang disebut sebagai “hard-border security regime” atau pengaturan keamanan perbatasan secara keras. Dalam pengaturan jenis ini, perbatasan dijaga dengan sangat ketat oleh pasukan bersenjata, sementara pintu perlintasan perbatasan terbatas jumlahnya dan dijaga tidak hanya oleh petugas imigrasi tetapi juga oleh petugas polisi dan tentara bersenjata. Negara yang memberlakukan “hard-border security regime” cenderung untuk membatasi keluar-masuknya pelintas batas dengan alasan keamanan nasional.³¹ Pos-pos perlintasan perbatasan Timor-Leste-Indonesia hanya berjumlah empat, yaitu untuk perbatasan timur di Mota Ain-Batugade dan Mota Masin-Salele, sedang untuk perbatasan barat di Wini-Sakato dan Napan-Bobometo.

Kebalikan dari “hard-border regime” adalah pengaturan perbatasan yang disebut “soft-border security regime” (pengaturan keamanan perbatasan secara lunak). Negara tidak terlalu membatasi pelintas batas karena tidak menganggap hal ini mendatangkan ancaman bagi keamanan nasional. Pos-pos perbatasan tidak dibatasi pada sejumlah kecil tempat. Penjaga perbatasan tidak perlu melibatkan pasukan bersenjata lengkap. Sistem ini biasanya dianut oleh negara-negara di kawasan yang mengembangkan prinsip hidup berdampingan secara damai (*peaceful co-existence*), negara-negara di kawasan tersebut tidak merasa terganggu keamanannya oleh kehadiran negara tetangganya sehingga tidak perlu membatasi lalu lintas pergerakan penduduk antar-negara. Dua negara yang bersahabat biasanya menganut sistem “soft-border regime,” karena keduanya tidak merasa saling terancam.³²

Dari pihak Timor-Leste, pengamanan perbatasan yang dilakukan sangat berbeda. Pasukan yang bertugas menjaga perbatasan bukanlah dari militer (F-FDTL) tetapi dari kepolisian yaitu dari Unidade Patrolhamento Fronteira Polícia Nacional de Timor-Leste (UPF PNTL – Unit Patroli Perbatasan Kepolisian Nasional Timor-Leste). Kekuatan UPF seluruhnya hanya 240 personil, jadi tidak sampai setengah dari kekuatan Satgas Pamtas RDTL-RI. Pasukan yang kecil ini tidak hanya bertugas menjaga perbatasan darat bagian barat (Oecusse) dan timur (Covalima dan Bobonaro) tetapi juga bertugas menjaga bandara internasional Nicolau Lobato di Dili.

Perbedaan juga terlihat pada pengaturan pintu-pintu keluar-masuk perbatasan kedua negara. Di sisi Indonesia, selain pos Imigrasi, Bea & Cukai, dan Karantina, di perbatasan juga ditempatkan pos TNI (Satgas Pamtas) dan pos POLRI. Pemeriksaan orang dan barang yang hendak melintasi perbatasan tidak hanya dilakukan oleh petugas Imigrasi, Bea & Cukai, dan Karantina, tetapi juga oleh petugas TNI dan POLRI di pos mereka masing-masing. Selain memeriksa paspor setiap orang yang melintasi perbatasan, petugas POLRI dan TNI masing-masing juga mencatat nama mereka. Kalau kita melintasi perbatasan dari Indonesia memasuki Timor-Leste, terasa sekali perbedaan sikap antara petugas Indonesia dan Timor-Leste. Para petugas perbatasan Timor-Leste memeriksa lebih santai dan ramah memperlakukan orang-orang yang hendak memasuki atau meninggalkan wilayah Timor-Leste.³³ Perbedaan penanganan perbatasan ini agaknya mencerminkan berbedanya pandangan para pemimpin Timor-

³¹ Ganewati Wuryandari, “Pengelolaan Keamanan Perbatasan: Kajian Teoretis,” dalam Ganewati Wuryandari (penyunting), *Keamanan di Perbatasan di Indonesia-Timor Leste* (P2P LIPI & Pustaka Pelajar), hal. 42-43.

³² *Ibid.*

³³ Referensi Fundasaun Mahein, Atambua, (17 Desember 2010)

Leste mengenai perbatasan. Misalnya, pada 2003 ketika menanggapi usul-usul mengenai penjagaan perbatasan oleh militer, Perdana Menteri Mari Alkatiri mengatakan, "Perbatasan adalah wilayah yang harus bebas dari militer karena perbatasan adalah pintu kita berhubungan dengan negara-negara sahabat, bukan tempat musuh-musuh kita."³⁴

Penjagaan perbatasan yang ketat oleh TNI ini agak tidak lazim. Biasanya "hard-border security regime" diberlakukan oleh negara-negara yang bermusuhan dengan negara yang berbatasan. Misalnya pengamanan perbatasan antara negara Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) dengan negara Republik Korea (Korea Selatan). Selain itu juga diberlakukan oleh negara yang mengkhawatirkan terjadinya arus migrasi masuk yang besar. Contohnya adalah pengamanan perbatasan oleh Amerika Serikat pada perbatasannya dengan Mexico untuk mencegah masuknya imigran ilegal yang berusaha memasuki Amerika Serikat untuk mencari kerja.

Indonesia jelas tidak sedang berperang atau menghadapi kemungkinan perang dengan Timor-Leste. Kedua negara sedang giat-giatnya membangun hubungan baik. Berbagai macam kerjasama bilateral sedang digalang, baik pada di bidang ekonomi, kesehatan,³⁵ pendidikan, dan promosi kesetaraan gender.³⁶ Panglima angkatan bersenjata kedua negara saling melakukan kunjungan dan pada bulan September 2009 membahas mengenai pengiriman anggota F-FDTL untuk mengikuti pendidikan militer di Indonesia.³⁷ Di tingkat regional, Indonesia menjadi sponsor Timor-Leste untuk menjadi anggota Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).³⁸ Pada bulan Maret 2011 Perdana Menteri Timor-Leste Xanana Gusmao mengahadiri perundingan internasional Pertahanan di Jakarta yang memdiskusikan tentang hubungan pertahanan Indonesia-Timor-Leste. Menurut Associated Press Indonesia memberitakan bahwa Indonesia meminjamkan uang kredit export kepada Timor-Leste untuk membelanjakan kapal-kapal patroli.³⁹ Menurut media Timor-Leste harian Suara Timor Lorosae Perdana Menteri Timor-Leste membicarakan tentang pembelian senjata-senjata dari Indonesia dengan President Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.⁴⁰

Kekuatan militer Timor-Leste jelas bukan merupakan ancaman bagi Indonesia. Jika dibandingkan TNI, kekuatan FALINTIL-Força de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) sangat kecil. Angkatan bersenjata Timor-Leste ini tidak memiliki kekuatan udara, unsur

³⁴ Indonesia, East Timor agree to demilitarize border (Jakarta Post. Pg. 1. 31 Oct.2001)

³⁵ Pada bulan Maret 2010, Menteri Kesehatan Timor-Leste Nelson Martins menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Menteri Kesehatan Indonesia untuk penurunan tingkat kematian ibu, pemberantasan penyakit malaria, kolera, TBC dan lain-lain ("Indonesia Jalin Kerjasama Bidang Kesehatan dengan Timor-Leste," *Republika*, 26 Maret 2010).

³⁶ Pada bulan September 2010, Sekretariat Negara Urusan Promosi Kesetaraan (Secretaria de Estado da Promoção da Igualdade) menandatangani Memorandum of Understanding mengenai kerjasama di bidang promosi kesetaraan gender ("SEPI Hala'o Kooperasaun ho Indonesia," *Ta'es* (buletin triwulan Secretaria de Estado da Promoção da Igualdade), No. 24 (Juli-September 2010).

³⁷ "Indonesia-Timtim Tingkatkan kerjasama Militer," *Republika Online*, 3 September 2009, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/09/09/03/73972-indonesiatimtim-tingkatkan-kerja-sama-militer>.

³⁸ Experts, Indonesia agree: Let Timor Leste join ASEAN", Jakarta Post, 10 April, 2011

(<http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/07/experts-indonesia-agree-let-timor-leste-join-asean.html>)

³⁹ <http://timorhauniandoben.blogspot.com/2011/03/timor-leste-interested-in-buying.html>

⁴⁰ Sosa Kilat Husi Indonesia F-FDTL-PNTL Presija Ekipamentus Militar, Suara Timor Lorosae, 24 March 2011 <http://suara-timor-lorosae.com/berita-3508--sosa-kilat-husi-indonesia-ffdtlpntl-presija-ekipamentus-militar.html> and <http://timorhauniandoben.blogspot.com/2011/03/sosa-kilat-husi-indonesia-f-ftdl-pntl.html>

kekuatan daratnya hanya berkekuatan dua batalyon infanteri, dan kekuatan lautnya hanya dua kapal patroli. Sementara kekuatan darat TNI di Timor Barat saja ada 6-10 kompi infanteri, dan di Kupang terdapat pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang cukup besar. Pangkalan TNI AU di Kupang diperlengkapi dengan radar dan perlengkapan pemantauan (*surveillance*) lain untuk memantau angkasa di kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor-Leste dan Australia. Patroli rutin angkasa perbatasan dilakukan oleh pesawat-pesawat tempur supersonik F-5E dari pangkalan ini.⁴¹ Personil pangkalan ini seluruhnya berjumlah 175 personil, yang mencakup Kopaskhas (Komando Pasukan Khas), yaitu pasukan khusus berkualifikasi komando.⁴²

Pangkalan TNI AL di Kupang adalah Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) VII, yang tidak hanya merupakan pangkalan kapal perang tetapi juga mencakup Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) karena di sini juga berpangkalan pesawat-pesawat udara milik TNI AL. Lantamal VII membawahi lima pangkalan yang lebih kecil yang disebut Pangkalan Angkatan Laut (Lanal), yaitu di Mataram (Lombok), Maumere (Flores), Kupang, Tual, dan Aru. Kapal-kapal perang dari Lantamal VII menjelajahi wilayah laut Indonesia dari kawasan selat Lombok di barat hingga laut Aru dan Arafuru di sebelah timur. Wilayah laut Timor-Leste di bagian utara dan timur dikelilingi oleh wilayah laut Indonesia yang dijelajahi oleh kapal-kapal Lantamal VII, hanya wilayah laut selatan (Laut Laut) yang tidak dijelajahi oleh kapal-kapal TNI AL karena berbatasan dengan wilayah Australia.⁴³

Selain keunggulan militer Indonesia, Timor-Leste juga bukan merupakan ancaman karena para pemimpin RDTL tidak menganggap Indonesia sebagai musuh dan sejak awal justru ingin berhubungan baik dengannya. Seperti berkali-kali dikatakan oleh Taur Matan Ruak bahkan sejak ketika menjadi Panglima Forças Armadas da Libertação de Timor-Leste (FALINTIL), "Kita bisa memilih kawan, tetapi tidak bisa memilih tetangga." Yang bermakna bahwa Timor-Leste harus berhubungan baik dengan negara-negara di sekitarnya. Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Staf F-FDTL Brigadir Lere Anan Timor (yang juga mantan komandan FALINTIL): "Dulu kita saling berperang karena Indonesia menduduki Timor-Leste dan Timor-Leste mau merdeka, tetapi setelah Timor-Leste merdeka menjadi negara berdaulat melalui referendum 1999, kita adalah saudara."⁴⁴

Pengamanan perbatasan Indonesia yang ketat itu bukan disebabkan oleh ancaman nyata terhadap Indonesia, tetapi lebih terkait dengan persepsi Indonesia mengenai ancaman terhadap negara dan bangsa Indonesia. Sejak masa Orde Baru, para pengambil kebijakan Indonesia kuat berpandangan bahwa karena letak geografis Indonesia di tempat strategis yang menghubungkan dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Lautan Pacific dan Samudera India), maka banyak negara "yang

⁴¹ "Pesawat Tempur Asing Terdeteksi di Selatan Pulau Rote, NTT," *Media Indonesia*, 19 Mei 2009. Situs jaringan The Nothrop F-5 Enthusiast Page menyebutkan bahwa empat pesawat F-5E berpangkalan di pangkalan El Tari. ("Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara," The Nothrop F-5 Enthusiast Page, http://cocardes.monde.online.fr/v2html/en/cartes/carte_monde.html)

⁴² "Air Force Personnel Stationed in Kupang," *The Jakarta Post*, 7 April 2005.

⁴³ Lantamal VII adalah bagian dari Armada Timur TNI AL yang bermarkas di Surabaya. TNI AL memiliki dua armada, yaitu Armada Timur dan Armada Barat (yang berpangkalan di Jakarta).

⁴⁴ Pernyataan ini dikemukakan dalam seminar mengenai keamanan laut yang dihadiri oleh Komandan Gugus Tugas Tempur Armada Timur TNI AL dan Panglima Angkatan Laut Australia, diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Timor-Leste di Hotel Timor, Dili, Juni 2010.

berkepentingan” terhadap Indonesia, dalam pengertian ingin menguasai Indonesia.⁴⁵ Pandangan semacam ini menciptakan “mentalitas terkepung”, yaitu perasaan umum bahwa Indonesia berada dalam keadaan terkepung oleh negara-negara sekelilingnya maupun negara-negara adikuasa yang ingin menguasainya. Hal ini terungkap misalnya ketika terjadi insiden pelanggaran perbatasan oleh kapal Tentara Laut Diraja Malaysia tahun yang lalu. Kelompok-kelompok masyarakat dan para politisi menyerukan agar Indonesia melakukan tindakan keras terhadap Malaysia. Tidak sedikit kelompok masyarakat yang menyerukan pembentukan pasukan sukarela untuk menyerbu Malaysia.⁴⁶ Padahal selama ini hubungan Indonesia dan Malaysia amat sangat baik, baik di tingkat bilateral maupun multilateral. Begitu baiknya hubungan kedua negara, sampai-sampai Malaysia memberikan bantuan senjata ketika Indonesia melakukan invasi ke Timor-Leste pada 1975.⁴⁷

Mentalitas tersebut membuat para komandan TNI sangat sensitif terhadap apa yang mereka anggap ancaman terhadap perbatasan Indonesia. Misalnya, ketika terjadi pelanggaran perbatasan oleh orang-orang Timor-Leste yang masuk ke wilayah Indonesia untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, komandan Pamantas menganggapnya sebagai “penyusupan.”⁴⁸ Pandangan mengenai penyusupan ini agaknya tidak berasal dari pengamatan yang nyata mengenai ancaman, tetapi lebih berasal dari pandangan abstrak mengenai ancaman yang diuraikan dalam dokumen-dokumen resmi Kementerian Pertahanan Indonesia. Misalnya, Buku Putih Pertahanan 2003 dan 2008 yang disusun oleh Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa ancaman yang dihadapi oleh Indonesia semakin lama semakin kompleks dan bahwa invasi militer kemungkinannya sangat kecil, tetapi bentuk-bentuk ancaman lain semakin meningkat.⁴⁹ Pandangan mengenai ancaman ini sangat berpengaruh pada komandan-komandan dan panglima-panglima TNI ketika mereka berbicara secara umum mengenai kondisi keamanan. Misalnya, ketika melantik Komandan Brigif 21/Komodo, Panglima Kodam IX Mayor Jenderal Hotmangaradja Pandjaitan menyebutkan bahwa ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara dapat berasal dari luar negeri seperti penyusupan (infiltrasi).⁵⁰ Contoh lain, ketika berbicara mengenai kebutuhan untuk menambah batalyon di NTT, Komandan Korem 161 mengatakan ini diperlukan untuk menjaga wilayah yang berbatasan dengan negara lain. Seolah-olah dua negara yang dimaksud, yakni Timor-Leste dan Australia bukan negara yang bersahabat dengan Indonesia sehingga menjadi ancaman terhadap Indonesia atau bisa digunakan oleh pihak lain untuk mengancam Indonesia. Ketika menjelaskan penambahan pos di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kepala Dinas Penerangan Umum Markas Besar TNI Kolonel Ahmad Yani Basuki mengatakan bahwa ini dilakukan untuk “mencegah kegiatan

⁴⁵ Pandangan seperti ini hingga kini disampaikan melalui berbagai kursus Lembaga Pertahanan Nasional yang diikuti tidak saja oleh para perwira menengah dan tinggi militer tetapi juga oleh pejabat-pejabat negara, pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi masyarakat, dan partai-partai politik. Pandangan ini juga disebarluaskan melalui sekolah-sekolah, terutama dalam pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, serta melalui penataran-penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

⁴⁶ “Jutaan Putra Purnawirawan TNI Siap Dikirim ke Perbatasan Malaysia,” *Rakyat Merdeka*, 27 Agustus 2010, <http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=2394>.

⁴⁷ Ken Conboy, *Kopassus – Inside Indonesia’s Special Forces* (Jakarta & Singapore: Equinox Publishing, 2003, hal. 225 & 231. Informasi ini berasal dari wawancara dengan Jenderal Benny Moerdani.

⁴⁸ “Banyak Warga Timtim Menyusup ke NTT Lewat Pasar Perbatasan,” situs jaringan Departemen Pertahanan, http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&new_topic=1

⁴⁹ Lihat Departemen Pertahanan, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21 – Buku Putih Pertahanan 2003*, hal. 45-52 dan *Buku Putih Pertahanan 2008*, hal. 6-8, 27-38.

⁵⁰ “Putra NTT Pimpin Brigif 21 Komodo,” *Pos Kupang*, 20 Februari 2010.

illegal ... misalnya pembalakan liar, perdagangan manusia, penyelundupan bahan peledak, infiltrasi, sabotase, serta kegiatan intelijen asing.”⁵¹

Pandangan semacam itu mengenai ancaman dari negara lain itu dikemukakan ketika para komandan/perwira TNI berbicara secara abstrak. Ketika berbicara secara konkret mengenai masalah-masalah yang dialami di perbatasan, para komandan tampak jelas sangat memahami apa yang mereka hadapi dan tidak berbicara secara doktriner. Misalnya, ketika berbicara mengenai pelanggaran di kawasan maritim NTT, Panglima Armada Timur TNI AL Laksamana Muda Bambang Sunarto mengatakan bahwa tindak pidana yang terjadi adalah pelanggaran wilayah, trafficking, illegal logging, illegal fishing, dan penyelundupan.⁵²

Mengenai masalah yang terjadi di perbatasan Indonesia dengan Timor-Leste, Komandan Korem 161 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pelanggarannya adalah:

- penyelundupan kayu ke Timor-Leste melalui pos lintas batas maupun melalui “jalan tikus”
- penjualan ilegal pupuk bersubsidi ke Timor-Leste (dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga di Indonesia)
- penyelundupan barang kebutuhan pokok yang harganya di Timor-Leste lebih dibanding di Indonesia, seperti gula
- pelintasan batas secara ilegal karena hubungan kekerabatan antara penduduk Timor-Leste dan penduduk Indonesia
- perkebunan penduduk kedua negara yang melewati garis perbatasan
- pergeseran patok perbatasan secara sengaja atau tidak sengaja oleh warga negara Timor-Leste untuk keperluan pertanian pribadi.⁵³

Uraian Komandan Korem tersebut menunjukkan bahwa pengamatan di lapangan justru berbeda dengan analisis abstrak mengenai ancaman yang memandang perbatasan sebagai daerah yang rawan terhadap ancaman dari luar atau dari dalam yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Uraian yang berasal dari pengamatan lapangan ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi di perbatasan adalah tindak pidana biasa, yaitu penyelundupan, pelintasan orang secara ilegal, dan pelanggaran wilayah untuk keperluan pribadi (bukan ekspansi wilayah oleh negara lain). Uraian tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian dari sumber pelanggaran berasal dari Indonesia sendiri, yaitu penyelundupan barang kebutuhan pokok dan kayu ke Timor-Leste.

V. Masalah-Masalah di Perbatasan

Dari pengamatan terhadap pemberitaan di media dan pengamatan langsung di lapangan, masalah-masalah di perbatasan darat Timor-Leste Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Garis perbatasan yang belum disepakati

Penentuan garis perbatasan oleh Indonesia dan Timor-Leste masih belum tuntas. Di beberapa titik, perunding kedua negara belum mencapai kesepakatan, yaitu di segmen Noelbesi, Manusasi, dan Malibaka. Selain itu ada satu titik yang belum disurvei, yaitu Subina-Oben.

⁵¹ “TNI Perkuat Perbatasan RI-Malaysia,” *Fajar*, 28 Juni 2010, <http://www.fajar.co.id/read-52525-tni-perkuat-perbatasan-rimalaysia>

⁵² “TNI AL Sikat Tindak Pidana di Laut NTT,” *Pos Kupang*, 22 Januari 2011.

⁵³ Kolonel I Dewa Ktut Siangan, *loc. cit.*, hal. 5-6.

Segmen Noelbesi belum disepakati karena perbedaan pandangan antara Indonesia dan Timor-Leste dalam membaca peta. Kedua negara menyepakati bahwa dasar penentuan perbatasan adalah dua perjanjian yang dilakukan oleh penguasa kolonial Portugis dan Belanda di masa lalu, yaitu *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominion on the Island of Timor* atau Traktat 1904 dan *Permanent Arbitral Awards* 1914.⁵⁴ Dalam kesepakatan Portugis dan Belanda disebutkan bahwa sungai Noelbesi adalah batas kedua wilayah. Perbedaan antara Timor-Leste dan Indonesia terjadi karena di segmen ini sungai tersebut bercabang dua. Pihak Indonesia beranggapan bahwa batas antara kedua negara terletak di cabang sungai di sebelah timur, sementara Timor-Leste beranggapan bahwa batas terletak di cabang sebelah barat. Perbedaan ini menimbulkan masalah di lapangan karena di tengah-tengah kedua cabang sungai ini adalah tanah yang subur untuk pertanian. Tempat yang bernama Naktuka ini disengketakan kepemilikannya oleh penduduk di wilayah Timor-Leste dan penduduk di wilayah Indonesia. Penduduk di wilayah Indonesia menentang penggarapan tanah yang dilakukan oleh penduduk Timor-Leste.⁵⁵

Perbedaan mengenai segmen Manusasi terjadi karena pihak Indonesia beranggapan bahwa untuk wilayah ini tidak lagi berlaku ketentuan dalam perjanjian antara Portugis dan Belanda karena menurut informasi penduduk di Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, wilayah yang dulunya milik Portugis itu telah diserahkan kepada penduduk di sisi Indonesia melalui suatu perundingan adat untuk penyelesaian suatu kasus pembunuhan pada sekitar tahun 1966. Pihak Timor-Leste tidak menyepakati pandangan Indonesia ini.⁵⁶

Perbedaan mengenai batas di sungai Malibaka di Memo terjadi karena pihak Indonesia berkeinginan agar yang dijadikan batas kedua negara adalah titik tengah sungai tersebut. Timor-Leste tidak sepakat karena berdasarkan perjanjian Portugis-Belanda yang menjadi batas adalah *thalweg* (titik terdalam) sungai tersebut, bukan titik tengah.

Belum ditentukannya batas di Subina-Oben terjadi bukan karena perbedaan pendapat antara pemerintah Timor-Leste dan Indonesia, tetapi karena survey untuk penetapan batas dihalangi oleh penduduk Indonesia di kawasan tersebut. Berdasarkan Traktat 1904, wilayah tersebut termasuk wilayah Timor-Leste. Tetapi penduduk Indonesia mengklaim bahwa mereka telah secara turun-temurun menggarap lahan di wilayah tersebut dan menolak survey penetapan batas. Mereka khawatir bahwa hasil survey berlawanan dengan klaim mereka.⁵⁷

⁵⁴ Ganewati Wuryandari, "Persoalan Demarkasi dan Keamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste," dalam Ganewati Wuryandari (penyunting), *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*, hal. 121-122. 2010

⁵⁵ "Timor-Leste Klaim Naktuka di NTT," *Kompas*, 11 Oktober 2009; "Indonesia Harus Tegas Atas Pendudukan Naktuka," *Berita Sore*, 14 Oktober 2010, situs jaringan Berita Sore, <http://beritasore.com/2010/10/14/indonesia-harus-tegas-atas-pendudukan-naktuka/>

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 129-130.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 134-135.

b. Penyelundupan

Penyelundupan sering terjadi melalui perbatasan dari Indonesia ke Timor-Leste. Barang-barang yang diselundupkan kebanyakan adalah barang kebutuhan pokok seperti rokok, sabun, mie instant, dan bumbu masak dan barang-barang bersubsidi seperti minyak tanah, bensin, dan pupuk. Penyelundupan ini terjadi karena barang-barang tersebut harganya lebih tinggi di Timor-Leste. Penyelundupan juga terjadi dari Timor-Leste ke Indonesia, yaitu untuk barang-barang yang harganya lebih murah di Timor-Leste seperti gula dan beberapa waktu lalu juga beras yang disubsidi oleh Kementerian Pariwisata, Perdagangan dan Industri Timor-Leste (MTCI).

Penyelundupan kadang-kadang melibatkan anggota TNI dan juga Polri. Misalnya pada tahun 2005, petugas dari Kepolisian Daerah (Polda) NTT menangkap tiga orang yang menggunakan satu truk milik TNI AL untuk menyelundupkan 21 drum berisi bahan bakar minyak ke Timor-Leste.⁵⁸ Menurut pengamatan kalangan NGO di Timor Barat, juga terjadi penyelundupan yang melibatkan kerjasama petugas Satgas Pamantas RI-RDTL dan UPF PNTL. Barang yang diselundupkan dari Indonesia diangkut dengan truk yang dikawal oleh petugas Satgas Pamantas pada malam hari. Di perbatasan Indonesia-Timor Leste, telah menunggu pembeli barang tersebut bersama petugas UPF PNTL.⁵⁹

c. Lintas batas ilegal

Masalah ini sering muncul sebelum pemberlakuan Pas Lintas Batas (PLB). Penduduk dari wilayah Timor-Leste sering masuk ke wilayah Indonesia untuk keperluan membeli barang kebutuhan sehari-hari untuk digunakan sendiri, membeli barang dagangan untuk dijual kembali di Timor-Leste, atau untuk keperluan keluarga seperti menengok keluarga, menghadiri upacara perkawinan, menguburkan keluarga yang meninggal dunia atau acara adat yang lain. Kunjungan ilegal ini kadang-kadang diketahui oleh petugas perbatasan Timor-Leste dan Indonesia. Tidak jarang petugas perbatasan Indonesia memungut sejumlah uang untuk lintas batas ilegal tersebut.⁶⁰

d. Pungutan tidak resmi

Pungutan tidak resmi dilakukan terhadap warganegara Indonesia yang melintasi perbatasan menuju Timor-Leste. Pungutan ini dilakukan oleh petugas Satgas Pamantas RI-RDTL di pos perbatasan Mota Ain. Setiap orang yang melintasi perbatasan diharuskan menyerahkan paspornya kepada petugas ini untuk dicatat. Bila petugas mendapati warganegara Indonesia yang untuk pertama kali melintas batas menuju Timor-Leste, petugas ini akan memanggilnya masuk ke pos dan memintanya menyerahkan uang sebesar antara Rp 50.000 dan Rp. 300.000.⁶¹

⁵⁸ "Indonesia detains three using navy truck to smuggle fuel into East Timor" [ringkasan dari berita Media Indonesia, 18 Juli 2005], dimuat situs jaringan ETAN, <http://www.etan.org>.

⁵⁹ Wawancara dengan DR, Kupang, Desember 2011.

⁶⁰ Wawancara dengan DR, Kupang, Desember 2010 dan VR, seorang penduduk Desa Memo, Maliana, yang beberapa kali memasuki wilayah Indonesia secara ilegal untuk keperluan membeli barang kebutuhan sehari-hari, Dili, Desember 2010.

⁶¹ Referensi Fundasaun Mahein, Mota Ain 17 December 2010

Pungutan tidak resmi lainnya berlaku untuk barang-barang ekspor dari Indonesia ke Timor-Leste. Setiap barang yang resmi diekspor harus melalui pemeriksaan pos TNI, POLRI, Bea & Cukai, dan Karantina. Agar para petugas tidak mempersulit para pengemudi truk yang mengangkut barang-barang tersebut, para pengemudi memberikan sejumlah uang kepada para petugas tersebut. Menurut seorang pekerja NGO di Timor Barat yang mengamati masalah ini, para pengemudi truk menyerahkan satu amplop berisi uang sebesar Rp 200.000 untuk setiap pos yang memeriksa. Pengemudi truk yang mengangkut barang memasuki Timor-Leste melalui Mota Ain, harus menyerahkan amplop kepada 10 pos. Pengemudi yang memasuki Timor-Leste melalui Wini/Sacato (Oecusse), harus menyerahkan amplop kepada tiga pos (karena petugas Karantina sering tidak ada, yang ada hanya TNI, Polri, dan Bea & Cukai), dan yang melalui Mota Masin harus menyerahkan amplop kepada enam pos.⁶²

e. Insiden pelanggaran perbatasan

Setelah kemerdekaan Timor-Leste dipulihkan pada tahun 2002 dengan penyerahan kedaulatan dari PBB, terjadi tiga kali insiden perbatasan yang melibatkan petugas perbatasan kedua negara. Insiden pertama terjadi di Malibaka pada tahun 2005 berupa penembakan terhadap seorang anggota TNI dari Satgas Pamantas RI-RDTL. Menurut petugas PNTL yang menjaga perbatasan, penembakan terjadi karena anggota TNI tersebut masuk melanggar perbatasan dengan membawa senjata dan ketika diperingatkan untuk mundur menolak peringatan tersebut. Pihak Indonesia berpendapat bahwa anggota TNI tersebut berada di wilayah Indonesia. Insiden kedua juga terjadi di Malibaka. Kali ini penembakan dilakukan oleh anggota PNTL terhadap tiga orang sipil warga negara Indonesia. Menurut anggota PNTL, tiga orang tersebut adalah anggota milisi pro-integrasi yang dipergoki sedang berada di dalam wilayah Timor-Leste. Orang-orang tersebut melawan ketika hendak ditangkap sehingga terjadi pergumulan dan kemudian ditembak. Pihak berwenang Indonesia beranggapan bahwa penembakan oleh anggota PNTL terjadi di wilayah Indonesia.

Insiden ketiga terjadi di Naktuka pada awal 2010. Sejumlah anggota TNI petugas Satgas Pamantas RI-RDTL masuk ke wilayah sengketa karena di wilayah itu dilakukan pembangunan gedung Kementerian Pertanian dan Kementerian Solidaritas Sosial Timor-Leste. Gedung-gedung tersebut dirusak oleh petugas Satgas Pamantas RI-RDTL. Hal serupa kembali terulang pada akhir Februari 2011.⁶³ Sejumlah anggota TNI memasuki wilayah Naktuka yang statusnya masih belum diselesaikan dalam perundingan antara kedua negara. Berita di media Timor-Leste menyebut jumlah mereka 17 orang dan mereka melakukan perusakan terhadap gudang milik Kementerian Pertanian dan Perikanan (Ministériu Agrikultura & Peskas) Timor-Leste.⁶⁴

f. Kekerasan terhadap penduduk sipil

Peningkatan kekuatan militer TNI di Timor Barat menimbulkan eksekusi berupa peningkatan kekerasan oleh anggota militer terhadap penduduk sipil. Pemicu kekerasan

⁶² Wawancara dengan DR, Kupang, Desember 2010.

⁶³ <http://temposemanaltimor.blogspot.com/2011/03/tni-invade-tan-naktuka-fasilidade.html>

⁶⁴ "TNI 'Invade' tan Naktuka, Fasilidade Estadu TL Lori Todan" ("TNI 'menginvasi' Lagi Naktuka, Fasilitas Negara Timor-Leste Merugi Besar"), *Tempo Semanal*, 2 Maret 2011.

ada bermacam-macam, mulai dari perselisihan pribadi hingga sangkaan bahwa penduduk sipil melakukan penyelundupan barang ke Timor-Leste. Pada bulan Januari 2006, seorang perempuan dari Oecusse yang memasuki wilayah Indonesia secara ilegal untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari ditangkap oleh anggota TNI yang bertugas menjaga perbatasan. Selanjutnya dia mengalami perkosaan oleh anggota TNI.⁶⁵ Kekerasan lebih banyak terjadi terhadap warganegara Indonesia sendiri. Misalnya pada November 2008 anggota TNI melakukan pemukulan terhadap seorang penduduk sipil bernama Emanuel Kolo, pada bulan September 2009 pemukulan dilakukan terhadap Jakobus Pausobe, pada 28 November 2009 penganiayaan dilakukan terhadap Goris Maneak dan Siprianus Nesi penduduk Kelurahan Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Para pelaku adalah anggota dari Yonif 742 (bermarkas Lombok) yang bertugas dalam Satgas Pantas. Sebagian korban adalah rohaniwan, seperti yang terjadi pada bulan Januari anggota TNI memukul Pastor John Oki Pr, pada September 2010 anggota TNI memukul pastor Paroki Santa Maria Mater Dei (Oepoli), Romo Beatus Nino (yang lebih dikenal sebagai Romo Bento). Menurut penduduk Oepoli, anggota TNI petugas pengamanan perbatasan sering membuat keonaran di lingkungan mereka, seperti mabuk dan melakukan perusakan.⁶⁶

Kejadian kekerasan terakhir korbannya sampai meninggal dunia. Kejadian ini berawal dari perselisihan antara tujuh orang pemuda dengan seorang anggota Yonif 744 pada 5 Maret 2011. Hari berikutnya anggota Yonif 744 ini bersama sejumlah temannya mencari para pemuda tersebut di rumah masing-masing. Para pemuda tersebut kemudian berhasil ditangkap oleh anggota-anggota Yonif 744 atau menyerahkan diri ke markas batalyon tersebut. Mereka ditahan di pos batalyon tersebut dan mengalami penyiksaan di sana hingga salah satu dari mereka (bernama Charles Mali) meninggal dunia pada 13 Maret 2011 dan lima orang lainnya harus dirawat di rumah sakit karena luka berat. Hari berikutnya, Modesta Datu, ibu dari Charles Mali meninggal dunia akibat serangan jantung karena terlalu terpukul akibat kematian anaknya.⁶⁷

Dipandang dari sudut masalah-masalah yang terjadi di perbatasan maka tampak bahwa penjagaan perbatasan yang dilakukan oleh pihak Indonesia seperti tidak sesuai dengan masalah-masalah yang ada. Jika masalah yang terjadi adalah penyelundupan maka keahlian yang diperlukan untuk menghadapinya adalah keahlian memberantas penyelundupan yang merupakan wewenang kepolisian, bukan militer. Insiden perusakan oleh anggota TNI di Naktuka sebenarnya bisa dihindari. Jika terjadi pelanggaran oleh pihak Timor-Leste berupa pembangunan gedung di wilayah sengketa maka yang

⁶⁵ Lembaga Advokasi dan Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas), satu NGO berbasis di Kefamenanu, dituduh oleh Komandan Korem 161/Wirasakti, Kolonel Noch Bola sebagai "agen asing di perbatasan" karena memprotes terjadinya perkosaan tersebut. Kolonel Bola menuduh bahwa perempuan Oecusse tersebut sengaja disusupkan ke Indonesia untuk "memancing reaksi militer Indonesia" ("Pancing Reaksi Militer RI, Korban Perkosaan Disusupkan PNTL," situs jaringan Kapanlagi.com, http://berita.kapanlagi.com/hukum-kriminal/pancing-reaksi-militer-ri-korban-perkosaan-disusupkan-pntl-gg3nz5d_print.html)

⁶⁶ "Batalyon Infanteri 742/SWY Agar Tidak Sakiti Rakyat," *NTT Online*, 14 Januari 2010 dan *Tempo Interaktif*, 27 September 2010.

⁶⁷ "Kronologi Kematian Charles Mali Korban Penganiayaan TNI di Atambua-NTT hingga Meninggal Dunia," disusun oleh Pastor Leo Mali, 14 Maret 2011. "Korban Tewas Akibat Penyiksaan TNI di Atambua dan Pemuda-Pemuda yang menjadi Korban Penyiksaan TNI di Atambua," *Komunitas Akar Rumput*, Kupang, 14 Maret 2011.

seharusnya dilakukan bukanlah merusak gedung tersebut, tetapi berkomunikasi meminta petugas Timor-Leste menghentikannya dan melapor kepada komandan Satgas Pamtas supaya laporan bisa diteruskan melalui jalur yang ada ke pejabat berwenang di tingkat nasional yang akan mencari penyelesaian melalui jalur politik/diplomatik. Agaknya masih diperlukan waktu bagi pembuat keputusan di Indonesia untuk mengolah pengetahuan yang diperoleh di lapangan untuk menjadi dasar bagi perubahan cara Indonesia mengamankan perbatasan daratnya dengan negara lain.

VI. Penutup

Kemerdekaan Timor-Leste dari pendudukan Indonesia membuat perbatasan darat antara Nusa Tenggara Timur dan Timor-Leste menjadi perbatasan internasional. Militer Indonesia meningkatkan kekuatannya di provinsi NTT, khususnya di Timor Barat. Dua sampai tiga batalyon infanteri digelar di Timor Barat, dan akan ditambah lagi dengan batalyon kavaleri, batalyon artileri pertahanan udara, dan detasemen zeni tempur. Kemampuan pengawasan udara dan laut ditambah dengan penambahan instalasi radar dan pangkalan laut di seputar Timor-Leste.

Peningkatan militer yang demikian itu berlebihan jika kita bandingkan dengan kekuatan militer di seberang perbatasan. Angkatan bersenjata Timor-Leste hanya berkekuatan dua batalyon infanteri 1.332 personil, Walaupun demikian menurut buku putih pertahanan Timor-Leste “forca 2020” menginginkan 3000 personil, 4 batalyon multi komponen.⁶⁸ Pada tahun 2010 peningkatan komponen lautnya berkekuatan empat kapal patroli, dan ada indikasi kuat ada penambahan untuk membelikan kapal patroli dari Indonesia atau Korea selatan. Sementara ini Timor-Leste belum ada komponen angkatan udaranya, namun demikian, perencanaan Sekretaris Negara urusan Pertahanan Timor-Leste mengaris bawahi komponen angkatan bersenjata udara pada bulan Desember edisi 2010 (Jurnal Pertahanan Nasional).⁶⁹ Walaupun Timor-leste melakukan penambahan kapasitas pertahanannya tetap kecil untuk dibandingkan dengan kekuatan TNI.

Peningkatan TNI ini jelas bukan disebabkan oleh ancaman yang nyata dari Timor-Leste, tetapi lebih disebabkan oleh persepsi Indonesia mengenai perbatasan sebagai wilayah yang rentan dimana terdapat ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengamanan perbatasan darat antara Indonesia dan Timor-Leste dilakukan dengan cara yang militeristis berupa penggelaran satu batalyon pasukan tempur di pos-pos sepanjang perbatasan. Sementara masalah yang dihadapi di kawasan perbatasan bukanlah ancaman militer berupa invasi maupun infiltrasi dari luar negeri, tetapi tindak pidana biasa seperti penyelundupan barang dan pelintasan batas ilegal, atau sengketa tanah akibat belum disepakatinya beberapa segmen perbatasan oleh kedua negara, dan pelanggaran perbatasan oleh petugas keamanan akibat dari belum adanya kesepakatan tersebut. Penanganan masalah-masalah ini memerlukan keahlian kepolisian dan keahlian lainnya yang bersifat non-militer dan harus melibatkan pihak yang lain dengan wewenang dan kompetensi yang sesuai.

⁶⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/Timor_Leste_Defence_Force

⁶⁹ Jurnal Defeza Nasional, Edisaun Dezembro 2010-Junhu 2011

Rekomendasi Fundasaun Mahein:

1. Direkomendasikan kepada Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia untuk mendirikan manajemen aparat perbatasan yang unik dengan pengawal perbatasan hanya dari individu-individu polisi saja.
2. Direkomendasikan kepada Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia untuk pro-aktif dan memberikan informasi kepada masing-masing warga negaranya menyangkut perkembangan hubungan pertahanan dan militer oleh ke dua negara.
3. Direkomendasikan kepada pemerintah Timor-Leste atas setiap jawaban yang berhubungan dengan perbatasan hanya dengan sistim damai dan dialogue
4. Direkomendasikan kepada otoritas dari Timor-Leste dan Indonesia disepanjang perbatasan untuk mengadakan pertemuan regular di Dili-Jakarta, Dili-Kupang, dan di kabupaten-kabupaten yang ada di sepanjang perbatasan.

Bibliograri :

“Air Force Personnel Stationed in Kupang,” *The Jakarta Post*, 7 April 2005.

“Banyak Warga Timtim Menyusup ke NTT Lewat Pasar Perbatasan,” situs jaringan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, www.dephan.go.id/modules.php?name=News&new_topic=1

“Batalyon Infanteri 742/SWY Agar Tidak Sakiti Rakyat,” *NTT Online*, 14 Januari 2010.

“Batalyon Penjaga Perbatasan Indonesia-Timor Leste Dirotasi,” *Antara*, 6 Januari 2011 (<http://www.antaraneews.com/berita/1294289370/batalyon-penjaga-perbatasan-indonesia-timor-leste-dirotasi>)

Conboy, Ken, *Kopassus – Inside Indonesia’s Special Forces* (Jakarta & Singapore: Equinox Publishing, 2003)

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad ke-21 – Buku Putih Pertahanan 2003*.

_____, *Buku Putih Pertahanan 2008*.

“Fuel smuggling along East Timor border again rampant” Detikcom web site, 22 May 2005, dimuat pada situs jaringan East Timor Action Network (ETAN), www.etan.org.

“Indonesia detains three using navy truck to smuggle fuel into East Timor” [ringkasan dari berita *Media Indonesia*, 18 Juli 2005], dimuat situs jaringan ETAN, <http://www.etan.org>.

“Indonesia Harus Tegas Atas Pendudukan Naktuka,” *Berita Sore*, 14 Oktober 2010, situs jaringan Berita Sore, <http://beritasore.com/2010/10/14/indonesia-harus-tegas-atas-pendudukan-naktuka/>

“Indonesia Jalin Kerjasama Bidang Kesehatan dengan Timor-Leste,” *Republika*, 26 Maret 2010.

“Indonesia-Timtim Tingkatkan Kerjasama Militer,” *Republika Online*, 3 September 2009, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/09/09/03/73972-indonesiatimtim-tingkatkan-kerja-sama-militer>.

“Indonesia to establish new naval base near East Timor,” *Antara*, 11 Mei 2005, dimuat pada situs jaringan ETAN, <http://www.etan.org/et2005/may/15/12itiest.htm>

- “Insentif TNI Perbatasan 75 Persen dari Gaji,” *Antara*, dimuat pada situs jaringan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, <http://www.kemhan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=9364>
- “Jutaan Putra Purnawirawan TNI Siap Dikirim ke Perbatasan Malaysia,” *Rakyat Merdeka*, 27 Agustus 2010, <http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=2394>.
- “Korem Wirasakti Naik Status,” *Pos Kupang*, 7 Januari 2011.
- “NTT Butuh Lima Batalyon TNI AD”, *Antara*, tanpa tanggal, dimuat pada situs jaringan Departemen Pertahanan RI, http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&new_topic=1
- “Panglima TNI Tinjau Perbatasan Indonesia-Malaysia,” *Antara*, 26 Februari 2011, <http://www.antaranews.com/berita/247738/panglima-tni-tinjau-perbatasan-darat-indonesia-malaysia>.
- Paragina, Judi “Re-Vitalisasi dan Re-Aktualisasi Pembinaan Teritorial Komando Kewilayahan TNI AA Guna Mendukung Kepentingan Pertahanan Matra Darat Pada Masa Mendatang,” situs jaringan Kodam Jayakarta, <http://www.kodam-jaya.mil.id/arsip-artikel-kontribusi/960-re-vitalisasi-dan-re-aktualisasi-pembinaan-teritorial-komando-kewilayahan-tni-aa-guna-mendukung-kepentingan-pertahanan-matra-darat-pada-masa-mendatang?start=1>.
- “Pastor di Kupang Dipukuli Anggota Pamtas Yonif 742,” *Tempo Interaktif*, 24 September 2010.
- “Perbatasan Timor Leste Harus Dijaga Ketat,” *Metronews.com*, 6 April 2010, situs jaringan Metro TV News, <http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/04/09/14783/Perbatasan-dengan-Timor-Leste-Harus-Dijaga-Ketat->
- “Pesawat Tempur Asing Terdeteksi di Selatan Pulau Rote, NTT,” *Media Indonesia*, 19 Mei 2009.
- Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat, “Pembinaan Teritorial Menurut Perspektif TNI dan Perspektif Komponen Bangsa Lainnya,” makalah, situs jaringan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, <http://www.tniad.mil.id/1artikel.php?pil=1&dn=20080812125129>).
- “Putra NTT Pimpin Brigif 21 Komodo,” *Pos Kupang*, 20 Februari 2010.
- “Rencana pembangunan Markas Brigif Mendapat Tantangan,” situs jaringan NTT Online, http://www.nttonlinenews.com/ntt/index.php?option=com_content&view=article&id=3662:rencana-pembangunan-markas-brigif-mendapat-tantangan&catid=52:lain-lain&Itemid=70.

“RI Navy continues to safeguard Kisar, Wetar Islands,” *Antara*, 10 Mei 2005, dimuat dalam situs jaringan ETAN, <http://www.etan.org>.

“Satgas Pamtas Dialihkan ke Yonif 743/PSY,” *Kursor*, 5 Januari 2011.

Siangan, Kolonel (Arh) I Dewa Ketut Siangan, “Peran TNI dalam Menciptakan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) yang Damai,” makalah untuk lokakarya Security Sector Reform, diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), di Atambua, 20 Agustus 2010.

“Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara,” The Northrop F-5 Enthusiast Page, http://cocardes.monde.online.fr/v2html/en/cartes/carte_monde.html.

“Timor-Leste Klaim Naktuka di NTT,” *Kompas*, 11 Oktober 2009.

“TNI AL Sikat Tindak Pidana di Laut NTT,” *Pos Kupang*, 22 Januari 2011.

“TNI AU Tambah Satu Radar di Sumba,” *Antara*, 6 Juli 2010, <http://www.antaraneews.com/berita/1278389612/tni-au-tambah-satu-radar-di-sumba>.

“TNI Evaluasi Pos Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia,” *Antara*, 27 Februari 2011, dimuat pada <http://id.news.yahoo.com/antr/20110226/tpl-tni-evaluasi-pos-pengamanan-perbatas-cc08abe.html>.

“TNI Perkuat Perbatasan RI-Malaysia,” *Fajar*, 28 Juni 2010, <http://www.fajar.co.id/read-52525-tni-perkuat-perbatasan-rimalaysia>.

“TNI Sudah Programkan Pembentukan Korem di Flores,” *Antara*, tanpa tahun, dimuat pada blog Alutsista, <http://alutsista.blogspot.com/2007/08/rusia-pertimbangkan-bangun-pangkalan.html> - links.

Wahana, H.D. “Pembinaan Teritorial dalam UU TNI,” *Suara Merdeka*, 19 Agustus 2009.

Wuryandari, Ganewati (penyunting), *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor-Leste* (Jakarta: P2P LIPI & Pustaka Pelajar, 2009).